



PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* DAN KINERJA APARATUR DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SE-KECAMATAN LASALIMU

Deki Pardana^{*1}, Nur Intan²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Corresponding Author: dekiperdana81@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Maret 2023</p> <p>Revised : 05 April 2024</p> <p>Accepted : 03 Mei 2024</p> <p>Publication : 31 Mei 2024</p>	<p>Abstract: <i>This study aims to examine the effect of good government governance and the performance of village apparatus on the accountability of managing village funds, using descriptive quantitative analysis, using multiple linear regression analysis in SPSS. The results of the study show while the performance of village apparatus has a positive effect on the accountability of managing village funds, it can be seen in the results of the partial test (t test) with a significance value of $0.00 < 0.05$, and where this shows a positive direction which can be seen in the calculated t value of 5.596 greater than the t-table of 1.998. And two independent variables simultaneously (together) have a positive effect on village fund management accountability, which can be seen from the significance value of the simultaneous test (f test) where the significance value is $0.00 > 0.05$, or Fcount is greater than ftable. Where the positive direction shows that the Fcount value is 32.248 while the ftable is 3.15. While the level of influence between the independent variables on the dependent variable can be seen from the adjusted R Square value of 0.298 or 29.8%. This indicates that the accountability variable for village fund management can be influenced by good government governance variables and village apparatus performance variables by 29.8%, while the remaining 70.2% is explained by other variables not present in this study.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh <i>good government governance</i> dan kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan analisis deskriptif kuantitatif, menggunakan alat analisis regresi linar berganda pada SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel independet secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang dapat dilihat dari nilai signifikansi uji simultan (uji f) dimana nilai signifikansi $0,00 > 0,05$, atau F_{hitung} lebih besar dari f_{tabel}. Dimana arah positif menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 32,248 sedangkan f_{tabel} sebesar 3,15. Sedangkan tingkat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent dapat dilihat dari nilai djusted R Square sebesar 0,298 atau 29,8%. Hal ini menunjukan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh variabel <i>good government governance</i> dan variabel kinerja aparatur desa sebesar 29,8%, sedangkan sisanya sebesar 70,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.</p>
<p>Keywords: Good government governance, Village Apparatus Performance, Village Fund Management Accountability</p> <p>Kata Kunci: Good government governance, Kinerja Aparatur Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab sebagai pelaksana dan penyelenggara pembangunan yaitu melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kewajiban dan tugas pokok pemerintah yang harus dilakukan dan diwujudkan. Pemerintah diharapkan sebagai penataan pelayanan publik yang diselenggarakan diberbagai sector terutama yang berhubungan dengan hak-hak dan kebutuhan masyarakat. *Good government governance* menjadi prasyarat yang harus diterapkan oleh setiap pemerintah demi terwujudnya aspirasi masyarakat agar tercapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara (Audia, Septiani dan Prathama, 2020). Menerapkan prinsip *good government governance* dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai berdasarkan daya tampung masyarakat dan pemerintah. Salah satu upaya strategis yang dilakukan demi mewujudkan *good government governance* di Indonesia yaitu dengan menyelenggarakan pelayanan publik. Pelayanan public menjadi standar kesuksesan dalam menjalankan kewajiban serta penilaian kinerja pemerintahan melalui birokrasi (Dwiyanto, 2017; 19).

Saat ini *good government governance* tidak hanya didominasi pemerintah semata. Masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan dimana komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan *good governance*, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (Budiati, 2019). Apabila aparat desa mengalami keterbatasan sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga ahli, maka bisa dibantu pihak akademisi atau lembaga profesional. Akademisi berbagai perguruan tinggi berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Kementrian Desa dan pemerintah kabupaten/kota juga harus membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam melakukan pendampingan. Berdasarkan pemahaman atas kondisi ril itulah kemudian dimusyawarahkan suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidakberesan dalam mengelola program desa. Masyarakat diharapkan agar dapat terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya (Rustiarini, 2016).

Menurut Segara (2017), *Good Government Governance* pada lingkungan pemerintahan sering dikenal dengan istilah *Good Government Governance* (GGG) atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tata kelola yang diterapkan untuk semua kegiatan publik agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pemerintahan yaitu pelayanan untuk publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik

diharapkan tata pemerintahan yang baik dapat terwujud, berdasarkan pedoman dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) tentang *Good Public Governance*, ada lima prinsip yang diterapkan dalam mewujudkan Good Government Governance yaitu: demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Dwiyanto (2017) *Good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal sehingga dapat menghasilkan pencapaian tujuan organisasi. Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam upaya pencapaian tujuan nasional (Mardiasmo, 2018).

Disisi lain Mardiasmo (2018) menjelaskan *good governance* sebagai sebuah konsep yang melakukan pendekatan melalui orientasi kepada pembangunan sektor publik dalam pemerintahan yang baik. Adapun tujuan penerpaan *good governance* yang merupakan bentuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan pada interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat.

Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip *good government governance* menurut Mardiasmo (2018), sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*). Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab.
2. Transparansi (*Transparency*). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2018).
3. Demokrasi (*Democratisation*). Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum.
4. Aturan hukum (*Rule Of Law*). Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

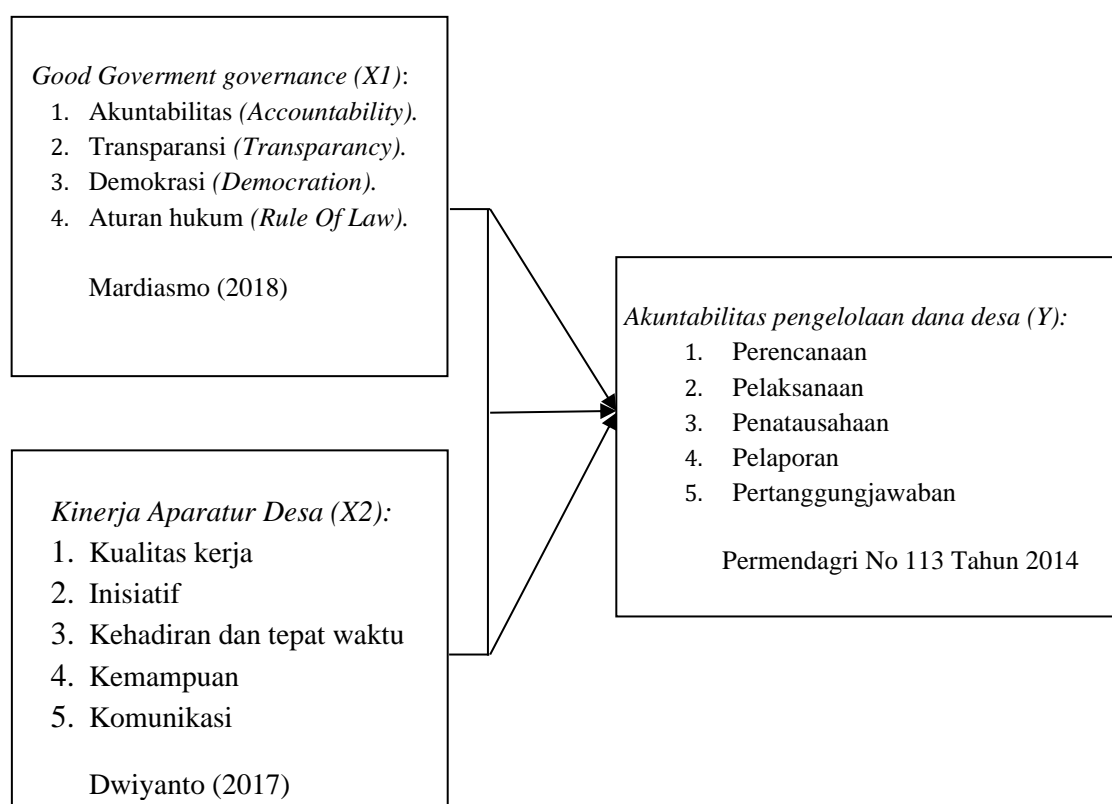
Sebagai wujud pelayanan publik, pemerintah memiliki fungsi pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk kinerja. Sebagaimana diungkapkan oleh Saputra, dkk (2022) bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

Begitu juga menurut Kasmir (2016) mengemukakan bahwa kinerja merupakan catatan *outcome* (hasil) yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Disamping indikator kinerja publik, juga terdapat indikator kinerja karyawan/ individu. Adapun menurut Dwiyanto (2017) untuk mengukur indikator kinerja karyawan sebagai berikut:

1. Kualitas kerja (*quality of work*), adalah kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi byang semakin berkembang pesat.
2. Kehadiran dan tepat waktu (*Promptness*), yaitu berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan.
3. Inisiatif, mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab.
4. Kemampuan, diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor kemampuan yang dapat dikembangkan.
5. Komunikasi, interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Disisi lain menurut Kristianto, dkk (2018) akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Didalam tata kelola pemerintah yang baik

terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip akuntabilitas publik karena akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban atas kegiatannya didalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam peraturan Menteri yang dimaksud dengan, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Adapun rinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban. Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut:



Pengelolaan Dana Desa itu sendiri merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Selain itu, dalam realitasnya praktik *good governance* pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat. Bertitik tolak dari kondisi riil tersebut peneliti menggunakan topik *good governance* sebagai alat analisis dalam pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Lasalimu.

Pada penelitian ini, penulis mencoba melihat sejauh mana penerapan *good government governance* dan kinerja aparatur desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Lasalimu. Dana Desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan Desa dan pelaksanaannya diawasi bersama serta dilengkapi dengan laporan secara tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Jika masyarakat menemukan kejanggalan dapat langsung ditanyakan kepada Kelapa Desa atau BPD. Hal-hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Melihat fenomena yang terjadi dilingkungan pemerintah daerah, khususnya pada pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Lasalimu, dimana kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama mengenai akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana desa, yang dapat mempengaruhi layanan kinerja pemerintah desa yang ada di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Dimana hampir sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah *good government governance* berpengaruh terhadap dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Lasalimu? Apakah kinerja aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Lasalimu? Apakah *good government governance* dan kinerja aparatur desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Lasalimu?

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Regresi Linier berganda. Analisis regresi ini untuk meramalkan variabel dependen jika variabel independen dinaikan atau diturunkan. Metode analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terkait. (Sugiyono, 2012)

1. Analisis Data Penelitian

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu hal atau fenomena secara umum. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk mempermudah penafsiran atau penjelasan.

b. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikannya, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan sehingga mudah dipahami.

2. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini juga akan dilakukan pengujian penyimpangan asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah yang meliputi:

a. Uji linieritas

Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linieritas. Hal ini dimaksudkan apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linier atau tidak. Uji ini ditentukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas sebagai predictor mempunyai hubungan linier atau tidak dengan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2007:265), “kalau tidak linier maka analisis regresi tidak bisa dilanjutkan”.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson Test (D-W), dimaksudkan untuk menguji adanya kesalahan pengganggu periode I dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya -1. Keadaan tersebut mengakibatkan pengaruh terhadap variabel dependen tidak hanya karena variabel independen namun juga variabel dependen periode lalu panduan angka D-W untuk mendeteksi autokorelasi adalah sebagai berikut : bila angka D-W diantara -2 samapai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Gihosali (2006:42)

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah dilakukan Uji Asumsi Klasik yang menghasilkan kelayakan dan model regresi linier berganda , yaitu dengan menggunakan program Excel dan program SPSS.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan model regresi berganda (multiple regression method) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X + \beta_2 X + e$$

Keterangan :

Y : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

a : Konstanta Regresi

β_1 : Koefisien Regresi

X_1 : Good Government governance

β_2 : Koefisien Regresi

X_2 : Kinerja Aparatur Desa

e : Variabel pengganggu diluar variabel yang dimaksudkan sebagai variabel diatas.

4. Pengujian Hipotesis

Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan pengujian secara parsial dan pengujian secara simultan serta analisis koefisien determinasi (R^2).

Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut :

a. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui samapi seberapa besar presentasi variasi variabel bebas pada model dapat diterangkan variabel terikat. Muhammad Teguh (2005:56). Koefisien determinasi dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Nilai Adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati atau sudah berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi tinggi.

b. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian secara parsial menggunakan uji t (pengujian signifikan secara parsial). Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah:

1) Menyusun hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1)

a) $H_0 : \beta_1 = 0$, diduga variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b) $H_1 : \beta_1 \neq 0$, diduga variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

2) Menetapkan kriteria pengujian yaitu :

a) Tolak H_0 jika angka signifikan lebih besar dari $\alpha = 5\%$

b) Terima H_0 jika angka signifikan lebih kecil dari $\alpha = 5\%$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Secara umum wilayah Kecamatan Lasalimu secara keseluruhan adalah daratan Pulau Buton. Lasalimu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Adapun luas wilayah Kecamatan Lasalimu memiliki luas wilayah seluas ± 327.29 km

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sesuai prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal sehingga dapat menghasilkan pencapaian tujuan organisasi. Adapun tujuan penerpaan *good governance* yang merupakan bentuk mewujudkan penyelenggaraan dalam pelaksanaan kebijakan yang dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat serta membangun system yang efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan, interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan juga masyarakat. *Good goverment governance* dianggap sebagai sebuah konsep yang melakukan pendekatan melalui orientasi kepada pembangunan sektor publik dalam pemerintahan yang baik. Dengan mengacu prinsip-prinsip, akuntabilitas (*Accountability*), transparansi (*Transparancy*), demokrasi (*Democraton*) dan aturan hukum.

Sebagai wujud pelayanan publik, pemerintah memiliki fungsi pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang ditunjukkan dalam bentuk kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Adapun yang menjadi indicator kinerja dalam penelitian ini adalah, kualitas kerja, inisiatif, kehadiran tepat waktu, kemampuan dan komunikasi.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Disisi lain akuntabilitas pengelolaan dana desa dianggap sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada pemerintah daerah berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Adapaun validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Significane	Keterangan
X1	X1.1	.468**	0.244	0,00	Valid
	X1.2	.654**	0.244	0,00	Valid
	X1.3	.673**	0.244	0,00	Valid
	X1.4	.578**	0.244	0,00	Valid
	X1.5	.635**	0.244	0,00	Valid
	X1.6	.625**	0.244	0,00	Valid
	X1.7	.577**	0.244	0,00	Valid
	X1.8	.714**	0.244	0,00	Valid
X2	X2.1	.676**	0.244	0,00	Valid
	X2.2	.544**	0.244	0,00	Valid
	X2.3	.565**	0.244	0,00	Valid
	X2.4	.675**	0.244	0,00	Valid
	X2.5	.699**	0.244	0,00	Valid
Y	Y.1	.723**	0.244	0,00	Valid
	Y.2	.530**	0.244	0,00	Valid
	Y.3	.729**	0.244	0,00	Valid
	Y.4	.678**	0.244	0,00	Valid
	Y.5	.720**	0.244	0,00	Valid
	Y.6	.635**	0.244	0,00	Valid
	Y.7	.566**	0.244	0,00	Valid
	Y.8	.711**	0.244	0,00	Valid
	Y.9	.601**	0.244	0,00	Valid
	Y.10	.647**	0.244	0,00	Valid

Sumber: Data diolah, 2023.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Teknik ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh *Good government governance* dan kinerja aparatur desa terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hubungan antara variabel tersebut dapat digunakan dalam persamaan sebagai berikut ini:

$$Y = a + b_1X_1+b_2X_2+e$$

Adapun hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Liner Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	41.370	5.996		6.899	.387
	Good government governance	.074	.136	.119	3.541	.002
	Kinerja Aparatur Desa	.321	.124	.502	5.596	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah:

$$Y-41.130+0,74X_1+0,321X_2$$

Dari persamaan model tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 41.130 merupakan konstanta atau keadaan suatu variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel *good government governance* (X1) dan variabel kinerja aparatur desa (X2). Ini menunjukkan bahwa jika variabel independent tidak ada, maka variabel kinerja aparatur desa tidak mengalami perubahan.
2. Nilai koefisien regresi variabel *good government governance* (X1) sebesar 0,74 menunjukkan bahwa variabel *good government governance* mempunyai pengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana setiap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar 0,74 yang disebabkan peningkatan nilai variabel *good government governance* (X1).
3. Koefisien regresi variabel kinerja aparatur desa adalah sebesar 0,321, menunjukkan bahwa variabel kinerja aparatur desa mempunyai pengaruh positif terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dimana setiap nilai variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar 0,321 disebabkan dari variabel kinerja aparatur desa (X2).

Adapun uji f pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Hasil Uji f ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.118	2	1.059	32.248	.000 ^b
	Residual	442.866	62	7.143		
	Total	444.985	64			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Kinerja Aparatur desa, Good Government governance (X1)

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi $0,00 > 0,05$, atau F_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} . Dimana F_{hitung} sebesar 32,248 sedangkan f_{tabel} sebesar 3,15. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good government governance* (X1) dan kinerja aparatu desa (X2) secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien deterinasi berada diantara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel.

Adapun haji uji koefisien determinasi pada penelitian ini adalah dapat dijelaskan pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585 ^a	.356	.298	2.67264

a. Predictors: (Constant), Kinerja Aparatur Desa, Good government governance

Sumber: Data diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat dilihat bahwa, nilai djusted R Square sebesar 0,298 atau 29,8%. Hal ini menunjukan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh variabel *good government governance* dan variabel kinerja aparatur desa sebesar 29,8%, sedangkan sisanya sebesar 70,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji regresi dalam penelitian bahwa semua hipotesis variabel yang digunakan dalam penelitian ini diterima, yang terdiri dari *good government governance* dan kinerja aparatur desa secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh $0,00 > 0,05$,

atau F_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} . Dimana F_{hitung} sebesar 32,248 sedangkan f_{tabel} sebesar 3,15. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good government governance* (X1) dan kinerja aparatu desa (X2) secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Temuan dari hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saftri, dkk (2023) bahwa *good government* dan kinerja pemerintahan desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan aparatur desa dan peningkatan ketaatan terhadap standar operasional dan aturan hukum yang ada. Juga penelitian yang dikemukakan oleh Soleh, dkk (2016) bahwa variabel *good government* yang mencakup akuntabilitasm transparansi dan responsivitas berimplikasi baik terhadap proses akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah. Atas dasar temuan tersebut, maka hipotesis, *H3: Good government governance dan kinerja secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa* diterima.

Ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2022) bahwa *Good Government Governance* dan kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat saling memengaruhi dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dalam penggunaan dan pengawasan dana desa. Keduanya dapat berdampak pada transparansi dan partisipasi. Sedangkan Segara (2017) menyebut bahwa aparatur desa yang berkinerja baik akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa. Mereka dapat memfasilitasi dialog dan konsultasi dengan masyarakat untuk memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga penggunaan dana desa lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good government governance* dan kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *Good good goverment governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang dilihat dari nilai signifikan hasil uji parsial (uji t) yaitu dengan nilai $0,002 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar 3,541 lebih besar dari nilai t_{tabel} yakni 1,998, ini menunjukkan suatu arah yang positif.

2. Kinerja aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dilihat pada hasil uji parsial (uji t) yakni nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$, dan dimana ini menunjukkan arah positif yang dapat dilihat pada nilai t_{hitung} sebesar 5,596 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,998.
3. Pengaruh *good government governance* dan kinerja aparatur desa secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang dapat dilihat dari nilai signifikansi uji simultan (uji f) dimana nilai signifikansi $0,00 > 0,05$, atau F_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} . Dimana arah positif menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 32,248 sedangkan f_{tabel} sebesar 3,15. Sehingga dapat dikatakan bahwa *good government governance* (X1) dan kinerja aparatur desa (X2) secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan pengaruh *good government governance* dan kinerja aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa se Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton hendaknya selalu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di desa, khususnya menyangkut akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan dana desa. Sehingga dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparatur pemerintah desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel lain dalam penelitian yang berhubungan dengan topik ini, sebagai pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dibidang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Bagi akademisi dan masyarakat umum, diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber pengetahuan yang bisa memberi wawasan baru terkait dengan topik tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintahan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Malik, E., Adan, L. H., & Dja€™wa, A. (2021). PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DI DESA WAWOANGI KEC. SAMPOIAWA DITENGAH PANDEMIC COVID-19. *Community Development Journal* :

Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 76–80.
<https://doi.org/10.31004/cdj.v2i1.1455>

- Abdullah, R. (2021). Edukasi Literasi Keuangan Pasar Modal Syariah pada Pengurus Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kolese Kota Baubau. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323 - 328. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.254>
- Abdullah, R. (2015). Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIPD) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 13(1), 36-42.
- Agustiningih, Maulina. (2020). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA STUDI KASUS PADA KABUPATEN KAMPAR. *Pekbis Jurnal*, Vol.12, No.3, November: 235-247.
- Agustina, S. ., Saenong, Z. ., & Tondi, L. . (2022). DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI DESA ATARI JAYA KECAMATAN LALEMBUU KABUPATEN KONawe SELATAN). *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 205–215. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.191>
- Audia, Baiq Hanita Septiani; Indah Ariffianti; Baiq Desthania Prathama. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DI DESA SAJANG KECAMATAN SEMBALUN. *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 6 No. 2.
- Budiati, Yuli. (2019). PENGARUH GCG TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*-Volume 3, Nomor 4.
- Dwiyanto, Agus. (2017). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK (T. U. PRESS (ed.).Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erawan Adi Saputra. (2022). AKUNTANSI PENERIMAAN DANA DAN PENGELOLAAN DANA PADA BANK MANDIRI SYARIAH KOTA BAUBAU. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 1(01), 38–61. <https://doi.org/10.62668/jiem.v1i01.148>
- Ernawati, E. (2022). PENGARUH IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PENINGKATAN CITRA PT.

- SEMEN TONASA DI DESA BULU CINDEA KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(03), 216–241. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i03.254>
- Fajri, R. (2015). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA PADA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA KANTOR DESA KETINDAN, KECAMATAN LAWANG, KABUPATEN MALANG). *Administrasi publik. Student journal.Ub*, 3 (7).
- Hasniati. (2016). MODEL AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PUBLIK*, Volume 2, Nomor 1.
- Ikke Nur Safitri, Mitha Fahni Sahira, Nadiatur Rohmah Al-Khoiriyah, Nafilah Sobibatur Rohmah, & Eny Latifah. (2023). PENERAPAN ZAKAT HASIL LAUT: STUDI KASUS RUKUN NELAYAN DESA KRANJI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 2(01), 45–71. <https://doi.org/10.62668/jiem.v2i01.693>
- Kamara, O. ., Abbas, B. ., & Putera, A. . (2024). PENGARUH HUBUNGAN ATASAN BAWAHAN, DISIPLIN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR KECAMATAN WENGGEDUKU KABUPATEN KONAWE. *JIAR : Journal Of International Accounting Research*, 3(1), 20–40. <https://doi.org/10.62668/jiar.v3i1.1016>
- Kasmir. (2016), *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (TEORI & PRAKTI)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2008), *PEDOMAN UMUM GOOD PUBLIC GOVERNANCE INDONESIA*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. ANDI: Yogyakarta.
- Monalisa, M. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BIAYA LINGKUNGAN TERHADAP LABA PERUSAHAAN PT. BINTANG INTERNASIONAL KENDARI. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 1(02), 190–211. <https://doi.org/10.62668/jiem.v1i02.1064>
- Mustaqim, F. ., & Pardana, D. . (2022). PELATIHAN PENGELOLAAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES BERBASIS ILMU AKUNTANSI DI DESA

- LAPANDEWA JAYA KEC. LAPANDEWA BUTON SELATAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 1(03), 40–45.
<https://doi.org/10.62668/berkarya.v1i03.109>
- Pazri, M. (2016). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA. *Badamai Law Journal* Vol.1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 tahun 2014 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Abdullah, L. O. D. (2018). Training of Financial Management on Society Self-Helping Agency at Kelurahan Palabusa, Baubau City, Southeast of Sulawesi. Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANCALL) 2018.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, R., & Dja'wa, A. (2020, February). The Effect of Budget Ratcheting on Financial and Non-Financial Performance. In *4th International Conference on Management, Economics and Business (ICMEB 2019)* (pp. 23-27). Atlantis Press.
- Prihatini, D., dan Kurniawan, H. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA TAPANG PULAU, KEC. BELITANG HILIR, KAB. SEKADAU). *Abdi Equator*, 1(2), 1–28.
- Rais R, M. . (2024). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LANGKOMU KECAMATAN MAWASANGKA TENGAH KABUPATEN BUTON TENGAH. *JIM : Journal Of International Management*, 2(01), 1–25.
<https://doi.org/10.62668/jim.v2i01.1070>
- Riaweni, W. O. I. ., Sutrisno, A. ., Musliani, M., & Masna, M. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BUMBES BERSAMA DESA KAPOTA. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 1(02), 155–164.
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v1i02.60>
- Rudi Abdullah. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUNGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT

- KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01), 13–18. <https://doi.org/10.62668/jics.v1i01.136>
- Rudi Abdullah. (2022). ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENJUALAN TUNAI TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT. MARINA MART KENDARI. *JIEM : Journal Of International Entrepreneurship And Management*, 1(01), 01–21. <https://doi.org/10.62668/jiem.v1i01.146>
- Rustiarini, Ni Wayan. (2016). *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Safrijal, M; Nasir Basyah ;Hasbi Ali. (2016). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume 1, Nomor 1: 176-191.
- Safitri, Amalia Eli., Pramomo, Joko,. dan Istiyani, Ambar. (2023). PENGARUH GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DAN PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI KASUS DI DESA BOTO KECAMATAN BANCAK, KABUPATEN SEMARANG *Jurnal Image*, Vol. 1 No. 3-April 2023.
- Saputra, Dian Eko; Muchlis Hamdi; Hyronimus Rowa. (2022). KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RENAH SUNGAI BESAR KECAMATAN LIMBUR LUBUK MENKUNANG KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI. *Journal of Government Studies* Vol. 1, No. 1.
- Segara, Lalu Danny. (2017). ANALISIS DETERMINAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* SERTA IMPLIKASINYA PADA KUALITAS LAKIP. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5, No.1.
- Sri Wani. (2022). ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG PADA CV. CITRA NIAGA CEMERLANG. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(01), 38–55. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i01.131>
- Soleh, A., Susanto, F., dan Susanti, R. (2016). PERSEPSI APARATUR PEMERINTAH DESA TERHADAP DANA DESA DI KECAMATAN SELUMA BARAT KABUPATEN SELUMA. *Ekombis Review* 114-125.

- Sugiyono. (2019). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sukarniati, L. ., Ramadhona Amalia Lubis, F., & Faudzi, M. . (2023). PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT DESA BANYUURIP KABUPATEN MAGELANG . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya*, 2(03), 88–93. <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i03.560>
- Surtiningsih, W. ., Sapitri Menghayati, O. ., Azizah, N. ., Amelia Putri, H. ., Tarissyaa, U. ., Rahmawati, T. P. ., & Hafizzallutfi, H. (2023). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG. *AT TARIIZ : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(04), 221–232. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i04.925>
- Taufikurrahman, T., Nisrina, A. Y. ., Sutrisno, A. I. ., Meiyantika, A. S. ., Pranata, H. A. ., & Bintari, P. F. . (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN SEBAGAI SARANA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UMKM "FINZA COOKIES AND CAKE" DI DESA MRANGGONLAWANG KECAMATAN DRINGU KABUPATEN PROBOLINGGO. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(02), 90–96. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i02.685>